



# Mengurangi Penggunaan Antimikroba Tanpa Resep Dokter: Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Menangani Resistensi Antimikroba di Indonesia

Riswandy Wasir<sup>1</sup>, Wahyu Sulistiadi<sup>2</sup>, Syuhada<sup>3</sup>, Aprilla Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Primayanti Nurul Ilmi<sup>1</sup>

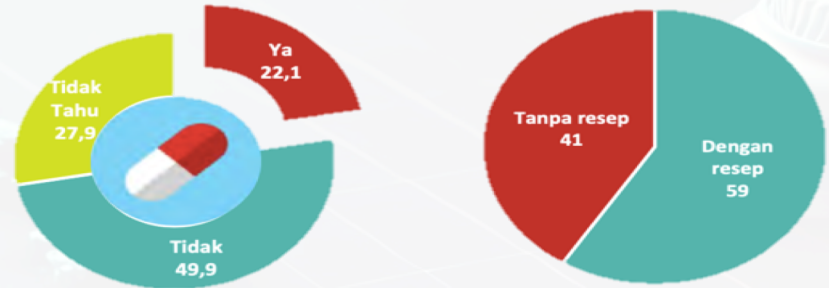
## Instansi:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; 2. Universitas Indonesia; 3. Politeknik Kaltara

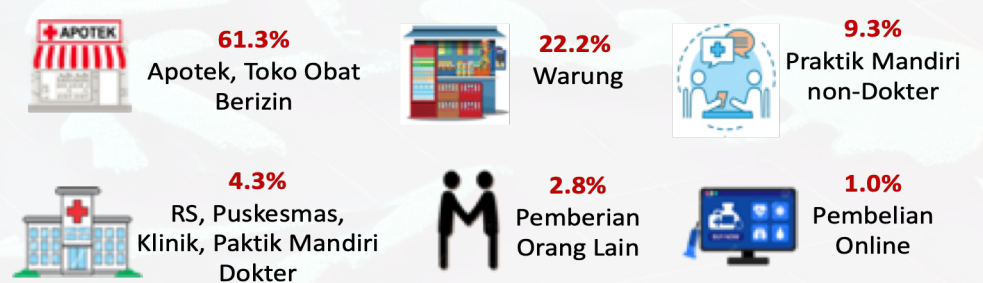
## LATAR BELAKANG

- Resistensi antimikroba (AMR) menjadi ancaman kesehatan global yang menyebabkan 4,95 juta kematian setiap tahun, dengan 1,27 juta di antaranya disebabkan langsung oleh resistensi bakteri.
- Di Indonesia, AMR menyumbang 133.800 kematian pada tahun 2019.
- Menurut *Survei Kesehatan Indonesia 2023*, 22,1% masyarakat menggunakan antimikroba oral dalam satu tahun terakhir, dan 41,0% di antaranya diperoleh tanpa resep dokter, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, status ekonomi terbatas, dan tanpa asuransi kesehatan.

## Proporsi Penggunaan dan Akses Antimikroba



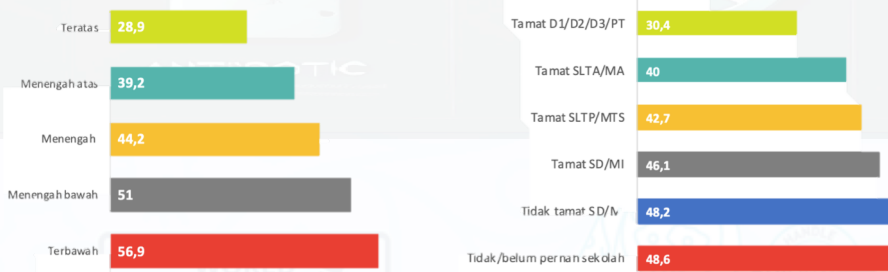
## Sumber Perolehan Antimikroba Tanpa Resep Dokter



## Perolehan Antimikroba Berdasarkan Area dan Asuransi



## Perolehan Antimikroba Berdasarkan Pendidikan dan Ekonomi

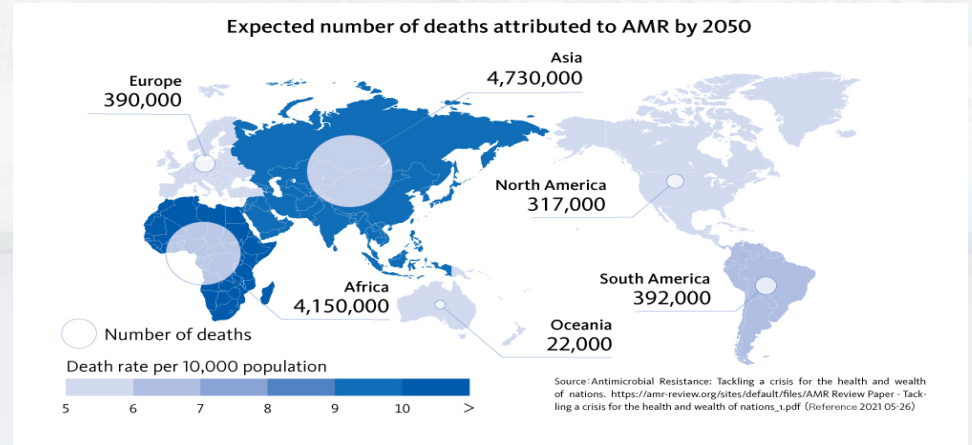


## DAMPAK KESEHATAN DAN EKONOMI

Jika tidak segera diatasi, resistensi antimikroba diperkirakan akan menyebabkan 10 juta kematian per tahun pada tahun 2050 dan menambah beban ekonomi global hingga USD 1 triliun akibat meningkatnya biaya perawatan kesehatan.

## MASALAH UTAMA

- Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, terutama di daerah pedesaan, dipicu oleh pemahaman yang keliru, seperti anggapan bahwa antibiotik dapat digunakan untuk infeksi virus dan bahwa penggunaannya dapat dihentikan saat gejala membaik.
- Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, biaya yang tinggi, dan waktu tunggu yang lama mendorong masyarakat untuk memperoleh antibiotik tanpa resep dari apotek atau warung, yang seringkali tidak diawasi dengan ketat, sehingga meningkatkan risiko resistensi.



## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Peningkatan Kesadaran Publik:** Memperluas kampanye kesadaran publik berbasis *Health Belief Model* melalui media sosial dan media konvensional, terinspirasi dari Program Strama di Swedia yang berhasil mengurangi penggunaan antibiotik secara berlebihan.
- Penguatan Peran Dokter dan Apoteker:** Meningkatkan peran tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan tentang resistensi antibiotik dan penerapan insentif berbasis kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Mengintegrasikan sistem pelaporan digital untuk memantau penjualan antibiotik tanpa resep dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar regulasi.
- Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Lintas Sektor:** Memperluas penggunaan *Whole Genome Sequencing* untuk deteksi cepat resistensi, serta mendorong pendekatan *One Health* dalam menangani resistensi antimikroba.
- Penguatan Surveilans dan Pengumpulan Data:** Mengimplementasikan sistem surveilans real-time yang mengintegrasikan data dari fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit untuk deteksi resistensi yang lebih cepat dan efektif.
- Kebijakan Sensitif terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi:** Melibatkan tokoh masyarakat dan universitas setempat dalam program edukasi berbasis masyarakat terkait resistensi antibiotik, serta memastikan distribusi obat yang merata ke daerah terpencil.